

Communication Policy of Muhammadiyah North Sumatra in the 2019 Election

Kebijakan Komunikasi Muhammadiyah Sumatera Utara Pada Pemilu 2019 dan Pengaruhnya di Dunia Pendidikan Islam

Abrar Adhani, Lahmuddin, Ahmad Tamrin Sikumbang

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
abraradhani@umsu.ac.id

ABSTRACT

The letter of instruction issued by the Muhammadiyah regional leadership (PWM) of North Sumatra regarding the dedication of political attitudes in one candidate for DPD RI participants inside the 2019 election has raised execs and cons for members and sympathizers of Muhammadiyah North Sumatra. The purpose of this observe is to analyze North Sumatra's PWM communication policy in responding to the 2019 DPD RI election. This study is qualitative research with a descriptive look at method. Informants are decided via judgment sampling approach, namely assets who've been decided based on wishes. The evaluation is finished by reducing the facts, imparting the statistics and verifying the existing records. The results of the study found that the North Sumatra PWM communication policy was part of Muhammadiyah's political ijtihad in a transparent manner and still provided freedom (as guide) for Muhammadiyah members and sympathizers in determining their political attitudes.

Keywords: *Communication Policy, Muhammadiyah, General Election.*

ABSTRAK

Surat instruksi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara terkait penentuan sikap politik pada satu calon anggota DPD RI pada pemilu tahun 2019 dalam menyikapi dinamika politik tahun 2019 telah menimbulkan pro kontra bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menyikapi nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan komunikasi PWM Sumut dalam menyikapi pemilu DPD RI tahun 2019 yang berasal dari Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling yaitu narasumber yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Hasil penelitian menemukan bahwa Kebijakan komunikasi PWM Sumut merupakan bagian dari ijtihad politik Muhammadiyah secara transparan dan tetap memberikan kebebasan (sebagai panduan) bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya

Kata Kunci: *Kebijakan Komunikasi, Muhammadiyah, Pemilihan Umum.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan perwujudan pada elemen demokrasi yang diaktualisasikan Indonesia untuk melahirkan tatanan pemerintahan dan pendidikan Islam di pusat maupun daerah agar lebih bermartabat. Segala cara dan rumusan diciptakan agar dapat mengambil hati para pemilih dengan tujuan akhirnya adalah memenangkan persaingan menuju kursi Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif tingkat pusat sampai ke daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah sebuah lembaga tinggi negara yang diatur pada elemen ketatanegaraan yang memiliki anggota perwakilan dari setiap provinsi sebanyak 4 (empat) orang wakilnya menjadi anggota DPD RI. Di sinilah muncul peran organisasi sosial kemasyarakatan salah satunya Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai basis massa dari calon Anggota DPD RI tersebut. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah Sumatera Utara tidak terlepas dari aktivitas kegiatan komunikasi. Komunikasi organisasi terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu komunikasi dengan rekan kerja, komunikasi dengan pimpinan dan kebijakan komunikasi organisasi itu sendiri (Yildirim, 2014). Kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah Sumatera Utara ber tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Ketika komunikasi dihadapkan berbasis target, kelompok-kelompok yang berada di dalam organisasi itu cenderung percaya bahwa kebijakan komunikasi yang dilakukan akan menguntungkan organisasi dan ekonomi perusahaan. Komunikasi berbasis target ini juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi yang sangat penting untuk memastikan kebijakan komunikasi yang telah dikeluarkan (D'Acunto et al., 2020).

Hadirnya Muhammadiyah sebagai bagian gerakan *civil society* dalam berkontribusi sebagai gerakan untuk mempertahankan dan menjalankan fungsi politiknya dalam kehidupan berbangsa, berkontribusi pada kebangkitan bangsa, Pancasila, dan UUD 1945. Menegakkan negara dalam pondasi yang kuat dalam konstitusi untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan politik kebangsaan Islam dalam perjuangan idealis dunia melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Muhammadiyah Sumatera Utara itu sendiri. Kebijakan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara yang tertuang dalam khittah perjuangan Muhammadiyah sebagaimana yang tersirat bahwa Muhammadiyah dapat didefinisikan sebagai organisasi dakwah dan bukan merupakan organisasi politik, bagi PWM Sumatera

Utara di terjemahkan dengan mengutip poin 7 dan 8 dari khittah perjuangan Muhammadiyah 2002 sebagai wujud dari implementasi peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan komunikasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menentukan senator (DPD) Republik Indonesia diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusianya dalam upaya peningkatan pelayanan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bertujuan untuk memberikan gambaran dan respon yang akan menghasilkan tindakan politik warga persyarikatan pada umumnya untuk ikut andil dalam pemilihan calon anggota DPD pada pemilu tahun 2019. Proses komunikasi yang dilakukan dalam menciptakan kebijakan komunikasi merupakan langkah penting terutama dalam menyikapi kondisi politik yang berlangsung (Adhani et al., 2022). Penerapan kebijakan komunikasi dapat menciptakan iklim organisasi yang kondusif secara vertikal dan horizontal dan diagonal oleh pimpinan kerja dan bawahan dalam suatu organisasi terhadap penerapan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang mewajibkannya (Purnomo, 2018)

Kebijakan komunikasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui surat instruksi agar memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yaitu Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum. Dalam menghasilkan kebijakan tersebut, secara organisatoris Muhammadiyah Sumatera Utara dalam mengeluarkan kebijakan senantiasa mengacu kepada aturan organisasi yang berlaku dan menerapkan manajemen organisasi guna menghasilkan keputusan yang tepat. Di mana manajemen organisasi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi antar pimpinan (Bucăța & Rizescu, 2017). Kebijakan ini merupakan strategi Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai bentuk komunikator politik kepada masyarakat dalam hal merancang sebuah pesan kebijakan komunikasi politik dalam bentuk retorika, dan fungsi komunikasi efektif agar dapat mempersuasion publik dan politik identitas Muhammadiyah. Dengan menghadirkan pesan politik sebagai bentuk narasi, Muhammadiyah mengajak masyarakat khususnya warga Muhammadiyah Sumatera Utara untuk ikut andil memenangkan calon yang turut diusung oleh Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kebijakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara melalui surat instruksi yang dilahirkan melalui kesepakatan organisasi sebab komunikasi organisasi menjadi alat instrumen dalam menyampaikan pesan kebijakan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dan tercapainya pendidikan islami dimasyarakat. Persoalan-persoalan pokok sehingga lahirnya kebijakan komunikasi karena sering terjadi konflik baik di sebuah organisasi atau dalam negara. Pada organisasi Muhammadiyah, dapat diasumsikan bahwa kebijakan komunikasi belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat belum mampu didukung dengan data-data riset, padahal formulasi kebijakan komunikasi dapat memberi pengaruh terhadap hal-hal yang bersifat sektoral dan departemen. Pertimbangan disusunnya kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dapat diperhatikan dari beberapa aspek antara lain adalah aktivitas komunikasi, kemajuan teknologi, mineral, sosial budaya, ekonomi, keamanan, kemanusiaan dan politik.

Kebijakan komunikasi Muhammadiyah Sumatera Utara dapat ditujukan untuk mendayagunakan infrastruktur komunikasi baik dalam bentuk komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi politik, maupun komunikasi antarpribadi tergantung pada sumberdaya manusia yang mengoperasikannya. Sumber daya manusia dan pendidikan keislaman terkait erat dengan keterampilan bagaimana cara manajemen komunikasi itu sendiri. Sistem komunikasi hanya berfungsi jika didukung oleh rekrutmen sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Kebijakan Komunikasi dalam bentuk Surat instruksi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara berisi instruksi untuk memilih salah satu calon anggota DPD RI yang juga merupakan fungsionaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bersifat resmi dan menekankan kepada seluruh anggotanya untuk dapat berperan aktif dalam pemilu tahun 2019 dengan salah satu langkah yang diambil adalah memilih nama sebagaimana yang tercantum dalam surat instruksi tersebut. Keputusan terlibat dalam kontestasi pemilihan umum ini sendiri lahir bukan dikarenakan keterpaksaan, akan tetapi setelah melalui proses panjang dan pengamatan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan kandidat yang telah ditetapkan akan membawa

kamshlahatan dan menunaikan komitmen demi kemajuan organisasi (Thomson, 2011; Thomson & Brandenburg, 2019)

Secara normatif, keluarnya surat instruksi ini menggambarkan sikap dan posisi Muhammadiyah yang dapat dilihat sebagai dilematisme organisasi, sebab keluarnya surat instruksi ini menimbulkan reaksi dan polemik bagi warga Muhammadiyah. Sebagaimana penelitian Al-Hamdi (2012) terkait varian sikap politik warga Muhammadiyah yaitu, pertama terkait dengan latar belakang sosiologis elite dan yang kedua terkait dengan kategori organisatoris. Selain hal tersebut, adanya ketidak sepahaman antar pengurus dikarenakan munculnya calon lain dari kader persyarikatan yang merupakan kader biologis Muhammadiyah sekaligus mantan ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2000-2005 yakni H. Ali Yakub Matondang yang juga maju sebagai calon anggota DPD RI di tahun yang sama.

Oleh karena itu, dalam mensosialisasikan keberadaan surat instruksi tersebut, diperlukan teknik komunikasi agar pesan yang dimaksud dapat tersampaikan kepada anggota dan simpatisan. Teknik komunikasi yang dapat dilakukan antara lain: *pertama*, melalui teknik informatif yaitu upaya menyampaikan pesan kepada seluruh anggota, *kedua*, teknik persuasif dengan cara mengajak atau menghimbau anggota, dan *ketiga*, melalui teknik hubungan manusia atau komunikasi interpersonal dengan memperhatikan kondisi dan situasi anggota (Rubino et al., 2017).

Pesan politik melalui surat instruksi PWM Sumatera Utara ini sendiri merupakan sebuah keputusan dalam mengarahkan anggota dan simpatisan guna menentukan pilihan politiknya. Botha (2014) menjelaskan bahwa dalam pesan politik, bukan hanya sekedar pesan yang bersifat resmi semata, tetapi melalui bahasa sindiran juga merupakan bagian dari pembangunan opini masyarakat. Melalui pesan politik yang dihasilkan oleh Muhammadiyah Sumatera Utara, pastinya menimbulkan tarik menarik kepentingan bagi yang mendukung dan yang kontra terkait dengan kebijakan tersebut (Schuck et al., 2014).

Secara organisatoris jelas bahwa isi pesan terkait dengan surat instruksi yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melanggar Khittah perjuangan Muhammadiyah meskipun di satu sisi merupakan *ijtihad* politik. Bagi Muhammadiyah hal ini juga merupakan bagian dari dakwah dan setiap warga Muhammadiyah berhak terjun ke dunia politik dan memberikan kebebasan pilihan politik bagi pribadi masing-masing warga Muhammadiyah di Sumatera Utara. Tetapi sangat disayangkan bahwa

beberapa warga Muhammadiyah baik di Daerah, Cabang dan Ranting memberikan kritikan terhadap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut untuk benar-benar istiqomah mempertahankan Khittah Muhammadiyah serta tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu meskipun kandidat calon anggota DPD RI adalah warga Muhammadiyah, sebab keberpihakan itu akan melahirkan kepentingan politik yang bersifat pragmatis bagi Muhammadiyah. Sikap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam realitas politik dinilai sebagai inkonsistensi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan. Penelitian ini memfokuskan pada tujuan untuk menganalisa bagaimana kebijakan komunikasi PWM Sumut menyikapi pemilu tahun 2019 khususnya terkait dengan pemilihan calon anggota DPD RI yang berasal dari Propinsi Sumatera Utara.

Kebijakan komunikasi tercipta sebagai wahana untuk dapat memperlancar sistem komunikasi (Aritonang, 2011). Dimana setidaknya terdapat 3 (tiga) bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu konteks, domain dan paradigma. Konteks terkait dengan aspek yang terdapat dalam kebijakan tersebut, domain terkait dengan isi komposisi dari kebijakan komunikasi dan paradigma terkait dengan kerangka cita-cita yang menjadi dasar tujuan dari kebijakan komunikasi tersebut. Kebijakan komunikasi tidak hanya terbatas pada surat semata, tetapi penegasan yang dilakukan melalui komunikasi lisan sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pesan pada masyarakat (Sokolovska et al., 2019).

Dalam kaitannya dengan kondisi sosial politik, kebijakan komunikasi yang dihasilkan oleh Muhammadiyah Sumatera Utara seharusnya dapat tersampaikan secara baik dan utuh kepada seluruh lapisan anggota. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah Sumatera Utara harus senantiasa memperhatikan berbagai aspek yang ada termasuk terkait dengan visi dan misi organisasi yang harus dapat dituangkan secara jelas dan terarah, sebagaimana hasil penelitian Masduki & Widyatama (2018) yang melihat tentang Strategi komunikasi politik elit Muhammadiyah Yogyakarta pada Pemilu 2014, dimana penyampaian visi misi dari calon kandidat anggota DPD yang di usulkan belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Sementara itu terkait dengan Kebijakan komunikasi PWM sebagaimana hasil penelitian Nawi (2015), ditemukan bahwa penerapan komunikasi organisasi yang tepat akan menciptakan iklim organisasi yang kondusif baik secara vertikal, horizontal, dan

diagonal. Sinergisitas komunikasi yang terbangun, akan memberikan hasil yang berdampak positif terhadap keberlangsungan organisasi.

Berangkat dari uraian tersebut dan beberapa kajian terdahulu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan komunikasi PWM Sumatera Utara dalam menyikapi pemilu DPD RI tahun 2019. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk melihat implementasi terkait penerapan kebijakan komunikasi yang dihasilkan serta efektivitas yang terjadi dari kebijakan komunikasi tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh dari kajian ini dapat menjadi gambaran bagi organisasi Muhammadiyah khususnya dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam menetapkan sebuah kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat tersampaikan kepada anggota dengan menghindari berbagai potensi konflik yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna mengeksplorasi dan memahami makna yang ada terkait dengan masalah yang dikaji (Creswell, 2014), hal ini dilakukan sebagai upaya mendeskripsikan secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti terkait fakta atau kondisi gejala yang muncul dalam kebijakan komunikasi PWM Sumut dalam pemilihan calon anggota DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Wawancara yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam melalui pendekatan *judgement sampling* yaitu narasumber merupakan orang-orang yang telah ditentukan oleh peneliti guna menjawab permasalahan penelitian serta berdasarkan kebutuhan dari peneliti sendiri (Sugiyono, 2017). Dalam kaitan ini adalah narasumber yang memahami proses terkait kebijakan komunikasi PWM Sumut dalam pemilihan Umum DPD RI Tahun 2019 serta dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif yang dapat dideskripsikan berdasarkan pandangan Miles dan Huberman (1992) yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data terkait rumusan masalah yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Kebijakan Komunikasi PWM Sumatera Utara pada Pemilu DPD RI Tahun 2019

Kebijakan komunikasi PWM Sumut dalam menetapkan calon anggota DPD RI Tahun 2019 merupakan sebuah ikhtiar dalam mengembangkan organisasi. Narasumber yang menjadi sumber data dalam kajian ini terdiri dari 4 (empat) orang yang memahami proses lahirnya surat instruksi untuk memilih saudara Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Narasumber merupakan ketua PWM Sumatera Utara, Wakil Sekretaris PWM Sumatera Utara, Ketua dan satu orang anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Sumatera Utara.

Keberadaan Muhammadiyah yang menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar dalam menyikapi setiap moemntum politik yang ada tidak terlepas dari keberadaan jumlah anggota dan simpatisan yang ada. Dengan mengusung calon tersendiri dalam pemilihan anggota DPD RI, diharapkan suara dari anggota dan simpatisan dapat diarahkan kepada calon yang telah dipersiapkan. Hal ini menjadi dasar pemikiran dan kebijakan yang dilakukan oleh PWM Sumatera Utara dalam mengusung kader terbaiknya untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPD RI perwakilan Sumatera Utara.

Penetapan Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari penilaian PWM Sumut berdasarkan kriteria dan pertimbangan seperti pertimbangan politik, ekonomi, kompetensi serta loyalitas terhadap pengembangan organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara yang merujuk kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan hasil rapat yang dilakukan PWM Sumut. Ketokohan Dr. Abdul Hakim Siagian bukan hanya dikenal oleh warga Muhammadiyah saja, melainkan elemen masyarakat lain juga mengenal sosok beliau. Aktifitas Abdul Hakim Siagian selain dosen juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara. Abdul Hakim Siagian juga aktif sebagai pengacara yang selalu tampil pada pendampingan hukum dalam membela kepentingan masyarakat. Kelebihan ini yang merupakan salah satu penilaian terhadap kelayakan sosok Dr. Abdul Hakim Siagian dalam mendapatkan dukungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain faktor popularitas calon, keberadaan Muhammadiyah sendiri sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di

Sumatera Utara khususnya menjadi nilai lebih dalam setiap kontestasi politik yang berlangsung.

Dari hasil rapat pimpinan maka dapat diaktualisasikan sebagai penilaian kebijakan komunikasi PWM Sumut dan menjadi acuan dalam melakukan interaksi keseluruhan proses kebijakan komunikasi. Adapun kebijakan komunikasi ini dibuat untuk mencapai suatu iklim kesamaan semangat/ spirit pada usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya komunikasi untuk mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan bangsa secara terencana dan tersistematis.

Dalam merumuskan pesan instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 melalui surat instruksi untuk memilih khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penjelasan ini merupakan identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis dalam membuat strategi organisasi, analisis ini didasari oleh logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) serta ancaman (*threats*).

Dalam merumuskan pesan instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut melalui surat instruksi untuk memilih khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Hakin Siagian, M.Hum terdapat kelemahan yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun upaya yang dilakukan oleh PWM Sumut untuk menghadapi itu dengan cara melakukan pendekatan kekeluargaan/ humanis, menjelaskan kepada warga Muhammadiyah Sumatera Utara alasan PWM Sumut mengeluarkan surat tersebut merupakan bagian ijtihad politik Muhammadiyah secara transparan dan menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menentukan sikap politiknya pada pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.

Melalui surat instruksi yang dikeluarkan PWM Sumatera Utara, maka pengurus Muhammadiyah melakukan proses sosialisasi kepada seluruh anggota dan simpatisan melalui jenjang organisasi yang bertingkat hingga ke lapisan ranting atau kelurahan/desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PWM Sumatera Utara ini sendiri sebenarnya

tidak terlepas dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat diseperti Muhammadiyah Sumatera Utara itu sendiri.

Selain itu kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh PWM Sumut terkait surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut dalam menginstruksikan untuk memilih salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara juga dapat diasumsikan sebagai sebuah perencanaan jangka panjang yang menetapkan alternatif dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang, selain itu juga menjadi kerangka acuan dasar dalam pencapaian perencanaan operasional jangka pendek. Masyarakat dalam hal ini anggota dan simpatisan Muhammadiyah Sumatera Utara pada dasarnya akan melaksanakan setiap kebijakan komunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi, selama kebijakan tersebut disampaikan melalui komunikasi yang baik dan efektif (Vardavas et al., 2021).

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada pemilu tahun 2019, tentang surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut hasilnya tidak sesuai dengan harapan, hal ini dapat dilihat dari perhitungan perolehan suara calon anggota DPD RI pada pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan Calon anggota DPD RI dari Sumatera Utara melahirkan empat orang anggota DPD RI terpilih yaitu: 1. Pdt. Willem T.P. Simarmata, (803.638 suara), 2. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H,MSP, (790.346 suara), 3. H. Muhammad Nuh, M.SP, (518.926 suara) dan 4. Dr Badikenita Br. Sitepu, S.E, M.Si, (496.760 suara).

Terkait dengan surat PWM Sumut tentang instruksi untuk memilih calon anggota DPD RI asal Sumatera Utara bernama Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum, walaupun telah mendapatkan dukungan berupa surat instruksi dari PWM Sumut namun tidak mendapat sambutan dan dukungan penuh (tidak berhasil terpilih menjadi anggota DPD RI) dari warga Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara kalkulasi hitungan suara di lapangan, dukungan warga Muhammadiyah Sumatera Utara telah terbelah kepada kedua calon anggota DPD RI yang sama-sama merupakan kader Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan akhir suara DPD RI yang menempatkan Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum pada urutan kedelapan dengan jumlah 418.659 suara dari 19 orang calon anggota DPD RI dan anggota Muhammadiyah lainnya yaitu Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang berada pada urutan 14 dengan jumlah 177.990 suara.

Implementasi Kebijakan Komunikasi PWM Sumatera Utara pada Pemilu DPD RI Tahun 2019

Sebuah perencanaan komunikasi dalam organisasi akan memiliki peran yang sangat strategis apabila melakukan beberapa tahapan diantaranya memahami hakikat perencanaan komunikasi, pendekatan perencanaan, dan langkah-langkah komunikasi yang dilakukan. Apabila itu dapat diaktualisasikan maka keefektifan kebijakan komunikasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam menjalankan organisasi dakwah. Manajemen dakwah suatu proses meliputi perencanaan tugas, mengelompokkan, menghimpun, menempatkan tenaga-tenaga pelaksana kebijakan, yang kemudian menggerakkannya kepada orientasi tujuan dakwah (Miftakhuddin, 2020).

Perencanaan strategis melalui surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut melalui surat instruksi untuk memilih khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat diwujudkan dengan adanya target yang didapat dengan pendekatan sistematis dan humanis melalui kegiatan dakwah Muhammadiyah melalui turda (turun ke daerah) serta memberikan pemahaman kepada anggota Muhammadiyah akan pentingnya terlibat dan menentukan sikap atas pilihan politiknya. Rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk mensosialisasikan kebijakan komunikasi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut melalui surat instruksi untuk memilih khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan komunikasi PWM Sumut melalui surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut melalui surat instruksi untuk memilih khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari prinsip dan penetapan kebijakan Muhammadiyah dalam mengusung kader Muhammadiyah yang dinilai memiliki peluang untuk maju dan memenangkan pemilihan umum calon anggota DPD RI tahun 2019. Adapun pertimbangannya adalah mulai dari loyalitas, juga ketokohan merupakan aspek penilaian PWM Sumut yang disusun melalui kebijakan komunikasi oleh sebuah organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Dalam implementasi penerapan kebijakan komunikasi, PWM Sumatera Utara melakukan berbagai aktivitas kegiatan melalui pendekatan secara humanis. Pendekatan ini dilakukan guna membangun kedewasaan berpikir anggota dan simpatisan dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi. Persoalan pemilihan umum bukan hanya

sekedar berbicara tentang menang kalah semata, tetapi lebih pada usaha untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlangsung secara berkesinambungan.

Penerapan implementasi ini sendiri tidaklah berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Hambatan yang terjadi dalam penyampaian pesan melalui surat instruksi tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara PWM Sumatera Utara dengan anggota Muhammadiyah sendiri. Pro kontra terhadap hasil kebijakan yang diambil oleh PWM Sumatera Utara senantiasa mewarnai setiap aktivitas anggota dan simpatisan dalam menyikapi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dipahami, bahwa pada dasarnya anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya merupakan orang-orang yang telah memiliki kecakapan dalam menentukan sikap politiknya. Sehingga surat instruksi yang dikeluarkan PWM Sumatera Utara untuk dapat memilih Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak serta merta diterima dan dilaksanakan oleh anggota dan simpatisan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Efektivitas Kebijakan Komunikasi PWM Sumatera Utara pada Pemilu DPD RI Tahun 2019

Keefektifan kebijakan komunikasi PWM Sumut terkait surat instruksi yang dikeluarkan dinilai tidak efektif, karena pesan kebijakan komunikasi yang disampaikan menimbulkan kontradiksi bagi sebagian warga Muhammadiyah. Hal ini telah melanggar khittah perjuangan Muhammadiyah yang menyebabkan penolakan bagi warga persyarikatan Muhammadiyah di Sumatera Utara khususnya yang ada di daerah, hingga tidak terpilihnya calon yang telah ditetapkan oleh PWM Sumut. Padahal, guna tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan, sudah semestinya komunikasi dilakukan kepada setiap pemangku kepentingan agar terciptanya komunikasi yang efektif (Malaval et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang dibangun oleh PWM Sumatera Utara dan juga oleh Kandidat yang di usung tidak berjalan secara baik. Padahal Green & Schwam-Baird (2016) menjelaskan bahwa pesan politik yang efektif itu adalah pesan yang mampu mempersuasi pemilih. Penggunaan kata-kata maupun bahasa yang di sampaikan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat pada dasarnya akan mempengaruhi sikap memilih masyarakat tersebut (Chou & Yeh, 2017).

Selain itu munculnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah lain yang maju dan juga merupakan kader Muhammadiyah yang tidak mendapat dukungan dari PWM Sumut dinilai sebagai sebuah kebijakan pragmatis, sebab calon lain tersebut merupakan kader ideologi Muhammadiyah yaitu Prof, Dr. H.A Yakub Matondang, MA yang tidak mendapat dukungan dari PWM Sumut, padahal calon tersebut merupakan mantan Ketua PWM Sumut.

Keefektifan kebijakan komunikasi dalam surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut dalam penggunaan media dinilai kurang efektif dan tidak maksimal. Media merupakan sarana bagi setiap orang maupun organisasi untuk menyampaikan informasi, mencari informasi, memuat peristiwa dan menyampaikan pendapat, serta media juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara utama bagi organisasi dalam penyebaran informasi. Dalam menyebarkan isi surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut, seharusnya penggunaan media secara maksimal dan efektif dapat membantu penyebaran pesan politik secara lebih luas kepada publik. Terlebih dengan menggunakan berbagai media interaktif baru yang tersedia, sosialisasi terkait dengan surat instruksi tersebut seharusnya dapat diterima oleh seluruh anggota dan simpatisan Muhammadiyah (Gurevitch et al., 2009).

Informasi yang disampaikan melalui media dalam mensosialisasikan surat instruksi pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut pada pemilihan umum calon anggota DPD yang dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik seperti radio UMSU, serta media online yang penyebarannya cukup luas dan dapat menjangkau semua tingkatan masyarakat nyatanya tidak menghasilkan dukungan yang signifikan terhadap calon yang di usulkan. Selain itu, saluran penyampaian pesan instruksional yang dilakukan PWM Sumut secara konstitusional dilakukan oleh PWM Sumut, seperti kegiatan turun ke daerah, melakukan kegiatan silaturahmi di daerah, cabang dan ranting Muhammadiyah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga dilakukan melalui pendekatan dakwah yang dapat dipercaya ampuh dalam penyampaian pesan terkait surat instruksi yang dikeluarkan oleh PWM Sumut berjalan tidak efektif.

Bila melihat dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan surat instruksi tersebut, ternyata salah satu faktor utama yang menjadi permasalahan guna mewujudkan kebijakan organisasi untuk mendudukkan Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan

Provinsi Sumatera Utara adalah tidak tersampainya pesan politik yang dibangun. Padahal melalui pesan politik atau janji-janji politik, akan memberikan hubungan antara kandidat dan pemilih, dimana janji-janji politik tersebut merupakan salah satu kontrak yang harus dipatuhi kandidat bilamana terpilih menjadi anggota legislative (Born et al., 2018; Dupont et al., 2019; Naurin, 2014; Schermann & Ennsner-Jedenastik, 2014).

Pengaruh Kebijakan Komunikasi PWM di Dunia Pendidikan Islam

Muhammadiyah secara organisasi dan sebagai gerakan dakwah berjuang di kalangan masyarakat, tidak hanya organisasi, tapi juga sebagai organisasi politik. Muhammadiyah yang tidak lepas dari politik (Pia Khoirotn Nisa, 2015: 100).

Dalam capaiannya Muhammadiyah di bidang pendidikan sangat luar biasa, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi hal ini sebagai bukti bahwa Muhammadiyah serius dan tidak main-main demi tercapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan (Mohammad Siddiq, Hartini Salama, 2018, 45). Sehingga kebijakan yang diterapkan sangat berpengaruh pada lini kehidupan bermasyarakat.

Tidak baiknya komunikasi akan menyebabkan dan akan berpengaruh kepada kebijakan yang dijalankan sehingga ketimpangan kualitas pendidikan dan pengembangan pendidikan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Juga berakibat ketidak mampuan menjawab tantangan dan peluang di daerahnya sendiri (Arif Rahman Prasetyo, 2020), yang pada praktiknya sering disalahgunakan, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Dalam aturan perpolitikan dengan organisasi tidak ada ketentuan khusus yang menjadi indikator pemegang kebijakan, sehingga semuanya berdasarkan otoritas politik dan organisasi. Hal inilah yang seringkali menimbulkan sikap kesewenang-wenangan politik sebagaimana yang telah berlangsung (Farid Setiawan, 2014: 63).

D. KESIMPULAN

Kebijakan komunikasi PWM Sumatera Utara dalam menyikapi pemilu DPD RI tahun 2019 dan pengaruhnya di dunia pendidikan Islam merupakan bagian ijtihad politik Muhammadiyah secara transparan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menentukan sikap politiknya pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Kebijakan komunikasi PWM Sumatera Utara dalam menyikapi pemilu tahun 2019 terkait pemilihan calon anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara rapat tertutup melalui pertimbangan organisasi seperti mulai dari loyalitas, ketokohan, elektabilitas, popularitas dan kedisukaan yang menjadi aspek penilaian PWM Sumatera Utara yang disusun melalui kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi yang dilahirkan pimpinan wilayah Muhammadiyah ini didasarkan atas kekuatan (*strenght*), meminimalkan kelemahan serta ancaman (*weakness-threats*), memaksimalkan peluang (*opportunities*). Implementasi penerapan kebijakan komunikasi, PWM Sumatera Utara melakukan berbagai aktivitas kegiatan melalui pendekatan secara humanis kepada anggota Muhammadiyah dan masyarakat baik daerah, cabang, dan ranting dengan melakukan kegiatan turda, pengajian, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa komunikasi organisasi Muhammadiyah dalam mensosialisasikan kebijakannya tidak berjalan secara efektif disebabkan faktor internal organisasi yaitu terdapatnya pro kontra terkait keluarnya surat instruksi tersebut, serta dari faktor eksternal yaitu ketidak mampuan Muhammadiyah dan Kandidat yang dicalonkan dalam mempersuasi anggota dan masyarakat pemilih. Demikian juga tidak baiknya komunikasi menyebabkan dan berpengaruh kepada kebijakan yang dijalankan sehingga ketimpangan kualitas pendidikan dan pengembangan pendidikan menjadi tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, bahkan berakibat tidak mampu menjawab tantangan dan peluang di masyarakat setempat.

Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk dapat melakukan kajian terkait dengan kebijakan

komunikasi Muhammadiyah Sumatera Utara pada Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2019. Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i1.1058>
- Al-Hamdi, R. (2012). Dinamika Islam Dan Politik Elit - Elit Muhammadiyah Periode 1998-2010. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 161–196. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0009>
- Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), 261. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i3.24>
- Born, A., van Eck, P., & Johannesson, M. (2018). An Experimental Investigation of Election Promises. *Political Psychology*, 39(3), 685–705. <https://doi.org/10.1111/pops.12429>
- Botha, E. (2014). A means to an end: Using political satire to go viral. *Public Relations Review*, 40(2), 363–374. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.11.023>
- Bucăța, G., & Răzescu, A. M. (2017). The Role of Communication in Enhancing Work Effectiveness of an Organization. *Land Forces Academy Review*, 22(1), 49–57. <https://doi.org/10.1515/raft-2017-0008>
- Chou, H., & Yeh, M. (2017). Minor Language Variations in Campaign Advertisements : The Effects of Pronoun Use and Message Orientation on Voter Responses. *Electoral Studies*, August, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.10.006>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- D'Acunto, F., Hoang, D., Paloviita, M., & Weber, M. (2020). Effective Policy Communication: Targets Versus Instruments. *SSRN Electronic Journal*, October, 20–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3764722>
- Dupont, J. C., Bytze, E., Steffens, M. C., & Schneider, F. M. (2019). Which Kind of Political Campaign Messages Do People Perceive as Election Pledges? *Electoral Studies*, 57, 121–130. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.11.005>
- Green, D. P., & Schwam-Baird, M. (2016). Mobilization, Participation, and American Democracy: A Retrospective and Postscript. *Party Politics*, 22(2), 158–164. <https://doi.org/10.1177/1354068815605678>
- Gurevitch, M., Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). Political Communication -Old and New Media Relationships. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 625(1), 164–181. <https://doi.org/10.1177/0002716209339345>
- Malaval, P., Bénaroya, C., & Aflalo, J. (2014). *Communication Policy*. 363–386. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01354-1_11
- Masduki, A., & Widyatama, R. (2018). Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(1), 1–18.
- Miftakhuddin. (2020). Manajemen Organisasi Dakwah Islam. *An-Nida' : Jurnal Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, VIII(1), 1–24.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Naurin, E. (2014). Is A Promise A Promise? Election Pledge Fulfilment in Comparative Perspective Using Sweden as An Example. *West European Politics*, 37(5), 1046–1064. <https://doi.org/10.1080/01402382.2013.863518>

- Nawi, R. (2015). Implementation of the Communication Policy of the Organization of Government in Indonesia. *Journal of Humanity*, 3(1), 28–41. <https://doi.org/10.14724/03.04>
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Noken*, 3(2), 11–26.
- Rubino, Hatta, M., & Abdullah. (2017). Communication Technique of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) In the Development of Cadre in North Sumatera. *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 1(2), 240–255.
- Schermann, K., & Enns-Jedenastik, L. (2014). Coalition Policy-Making under Constraints: Examining the Role of Preferences and Institutions. *West European Politics*, 37(3), 564–583. <https://doi.org/10.1080/01402382.2013.841069>
- Schuck, A. R. T., Vliegthart, R., & De Vreese, C. H. (2014). Who's Afraid of Conflict? The Mobilizing Effect of Conflict Framing in Campaign News. *British Journal of Political Science*, 46(1), 177–194. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000525>
- Sokolovska, N., Fecher, B., & Wagner, G. G. (2019). Communication on the Science-Policy Interface: An Overview of Conceptual Models. *Publications*, 7(64), 1–15. <https://doi.org/10.3390/publications7040064>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomson, R. (2011). Citizens' Evaluations of the Fulfillment of Election Pledges: Evidence from Ireland. *Journal of Politics*, 73(1), 187–201. <https://doi.org/10.1017/S0022381610000952>
- Thomson, R., & Brandenburg, H. (2019). Trust and Citizens' Evaluations of Promise Keeping by Governing Parties. *Political Studies*, 67(1), 249–266. <https://doi.org/10.1177/0032321718764177>
- Vardavas, C., Odani, S., Nikitara, K., El Banhaw, H., Kyriakos, C., Taylor, L., & Becuwe, N. (2021). Public perspective on the governmental response, communication and trust in the governmental decisions in mitigating COVID-19 early in the pandemic across the G7 countries. *Preventive Medicine Reports*, 21, 101252. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101252>
- Yildirim, O. (2014). The Impact of Organizational Communication on Organizational Citizenship Behavior: Research Findings. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 150, 1095–1100. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.124>
- Pia Khoirotun Nisa. (2015). Karakteristik Budaya Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1).
- Mohammad Siddiq, Hartini Salama. (2018). PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal MUQADDIMAH*, 14(3).
- Arif Rahman Prasetyo. (2020). Implementation of Character Education Policy in MTs Muhammadiyah Al Manar Demak Regency. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1).
- Farid Setiawan. (2014). Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi Guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, III(1).